BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁴ Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.⁵

Peraturan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam tentang fungsi rukun tetangga, tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, hal tersebut dijelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat".⁶

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 7 menuturkan bahwa ketua rukun tetangga bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan

⁴Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945

⁵Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1

⁶Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pelaksanaan peran dan fungsi rukun tetangga dalam pasal yang telah disebut tadi sering kali mengalami kendala atau hambatan, diantaranya yang komunikasi yang

tidak baik antara Ketua RT dengan Kepala Desa, informasi Pasal 7 tersebut tidak sampai kepada ketua RT, dukungan dari pemerintah daerah akan kepemimpinan Ketua RT masih kurang dimana Ketua RT kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting di kelurahan.

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangsanya sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.⁷

Pada hakekatnya perubahan alami dan terukur dalam pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha

⁷Randi R. Wrihatnolodan Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, (Jakarta: PTElexMedia Komputindo, 2006), hal.10

amenaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat dalam ayat ini, umat muslim dikehendaki memiliki sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya serta membantu pembangunan dalam pemerintahan.

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam. Hal ini diperjelas dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁸

Berdasarkan surat di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suatu masyarakat

⁸Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59

mentaati pemimpinnya. Adapun tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah “*Iqamatud din wa siyasatud dunya bihi.*” Yang ditafsirkan menegakkan agama dan mengatur urusan duni dengan agama. Menegakkan agama (*Iqamatud din*), terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama menjaga agama (*hifdzudin*) dan yang selanjutnya adalah menjalankan agama (*tanfidzuhu*). Sedangkan bentuk penjagaan terhadap Islam adalah menjaga orisinalitas ajaran Islam dari penyelewengan. Hal ini menjadi tugas para pemimpin umat Islam.

Abu Ya’la berkata: “Wajib bagi imam menjaga *din* ini sesuai dengan pokok-pokok ajaran para salaf. Jika seseorang tergelincir di dalam syubhat, maka wajib bagi imam untuk menjelaskan hujjah, menunjukkan yang benar dan menghukumnya dengan hukuman yang pantas jika ada aturan atau hak yang dilanggar. Hal ini dilakukan agar agama terjaga dari kerusakan (pemahaman) dan ummat terhalang dari ketergelinciran.”⁹ Hadist di atas menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah menjaga masyarakatnya untuk tetap berada di jalur Islam, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar syariat Islam.

Menurut Rivai, ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Islam adalah seorang pemimpin setia, memiliki tujuan, berpegang pada syariat dan akhlak Islam, mengemban amanah dengan baik, tidak sombong, memiliki niat yang tulus.¹⁰ Menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah, dengan memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik diharapkan pemimpin dapat menjadi panutan bagi masyarakat maupun sekelompok orang yang dipimpinnya.

⁹Kitab *Al-Ahkam As-Sulthoniyah Abu Ya’la*, hal. 27

¹⁰ Rivai Veithzal, *Kiat Kepemimpinan dalam Abad 21*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), hal. 72

Wilayah terkecil dalam pemerintahan masyarakat di pimpin oleh ketua rukun tetangga. Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.¹¹ Rukun tetangga menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan - peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada di tengah konflik masyarakat sehingga ketua RT yang lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018, Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian antar

¹¹ BintoroTjokroamidjojo, *PengantarAdministrasiPembangunan*, (Jakarta:LP3ES,2009), hal.

warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Oleh karena itu setiap masyarakat yang menjadi anggota RT harus mematuhi segala aturan yang ada.

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, dan Ketua RT berperan penting dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Rukun Tetangga begitu amat penting dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan jalannya proses pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga.

Tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan. Di dalam Islam, seorang pemimpin wajib menjaga dan melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya.

Ketua RT dalam fiqih siyasah juga dapat disebut sebagai imam dan khalifah. Istilah imam lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah,

sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.¹² Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara (al-Imamah al-Kubra) dan imam dalam arti yang mengimami shalat (al-Imamah Shugra).¹³

Kata khalifah sebagai pimpinan adalah pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan khulafa' al-rasyidin.¹⁴

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberi pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu peranan dan fungsi Rukun Tetangga (RT) juga perlu diatur dengan hukum Indonesia agar jelas kepastian hukumnya bagi pihak terkait. Rukun Tetangga merupakan perangkat pemerintahan yang terkecil namun memiliki peranan yang berarti disuatu daerah di sebut Rukun Tetangga. Pemerintahan Indonesia mengatur peranan dan fungsi Rukun Tetangga secara hukum tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018.

Rukun Tetangga dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat,

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 129

¹³ A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenia Media Group: 2007), hal. 56.

¹⁴ Ibid, hal. 59

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Peran dan fungsi Rukun Tetangga di atur dalam pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas Rukun Tetangga adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.¹⁵

Berdasarkan tugas Rukun Tetangga dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 di atas dapat dilihat bahwa peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga sangatlah penting dalam mendukung terlaksananya program-program pemerintahan karena Ketua Rukun Tetangga merupakan membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa. Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait tugas dan fungsi Rukun Tetangga merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa menjelaskan bahwa di Kabupaten Tulungagung, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terdiri diantaranya RT, yang artinya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh ketua RT bukan oleh Kepala Dusun. Ketua RT memiliki tugas melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan, menjembatani hubungan antar penduduk di

¹⁵ Pasal 1 Permendagri No 18 Tahun 2018

wilayah kerjanya, membantu penanganan masalah penduduk dan lainnya.

Ketua Rukun Tetangga merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan persyaratan yang di tentukan oleh Permendagri dan merupakan sosok yang cakap, disukai masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Mulai dari pertengkaran antar warga, kenakalan remaja, keamanan lingkungan, gotong-royong, perselingkuhan, batas tanah, kependudukan hingga persoalan ketidakadilan pemberian bantuan kepada masyarakat. Seolah-olah Ketua RT menjadi tumpuan awal penyelesaian persoalan warga di lingkungan Rukun Tetangganya bahkan ada yang mengatakan sebagai tempat pembuangan “sampah” masalah.

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Pengurus Rukun Tetangga memiliki tanggungjawab yang besar didalam menjaga ketentraman dan kerukunan antar warga. RT juga menjadi mitra Pemerintah Desa dalam mendorong peran serta warga untuk meningkatkan keswadayaan dalam membangun desanya. Ketua RT maupun pengurus yang lain tentu tak mendapatkan gaji ataupun honor dari pekerjaanya, hanya insentif sebagai operasional diberikan oleh desa kepada mereka, itupun diterimakan 3 bulan sekali dan baru dimulai beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk membahas mengenai peranan dan fungsi pejabat RT dalam pembangunan. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Dengan ini penulis mendapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran Rukun Tetangga menurut Permendagri No 18 Tahun 2018 di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Rukun tetangga di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Rukun Tetangga menurut Permendagri No 18 Tahun 2018 di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh *siyasah* terhadap peran Rukun tetangga di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktismeliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum kebijakan publik dan fiqih siyasah tentang implementasi peraturan menteri dalam negeri, antara lain:

a) Kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum kebijakan publik:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran peraturan menteri dalam upaya memberikan paham peran dan fungsi pemimpin. Hal ini dapat melengkapi teori-teori hukum yang sudah ada.

b) Peningkatan kesadaran hukum: Dengan menganalisis peraturan dan tanggung jawab hukum dalam peran dan fungsi kepemimpinan rukun tetangga, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemerintah, dan masyarakat umum.

c) Pengembangan dan penerapan aturan yang telah dirumuskan secara optimal melalui analisis implementasi peraturan menteri dalam negeri. Dalam hal ini, diharapkan penelitian dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan sumber daya masyarakat dan menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menambah pengalaman serta menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana penerapan peraturan menteri dalam negeri tentang peran dan fungsi rukuntetangga.

b. Bagi Pemerintah Desa Ringinpitu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat dan evaluasi peranan dan fungsi rukun tetangga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat atau bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya serta untuk mengembangkan atau melaksanakan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Akademis

Sebagai persyaratan akademis guna menyelesaikan kuliah serta menempu Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tafsir makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah” dalam penelitian ini adalah suatu penelitian lapangan tentang bagaimana penerapan peraturan yang digunakan sebagai acuan jalannya peran kepemimpinan rukun tetangga di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Rangkaian Aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan.¹⁶ Menurut Paul A, Sabatler dan Daniel Mazmantan, 1980 dalam (Subianto 2020:21) implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dalam badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan maupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Van Meter dan Van Horn 1975 dalam (Abdal, 2015:152) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan”.

¹⁶Yusuf Sabilu, Jafriati, Asnia Zainuddin, Zainab Hikmawati, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022),hal. 8

Kemudian merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai : “*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” artinya Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

(pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

Merille S. Grindlle 1980 dalam (Handoyo, 2012a) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri disebut dengan permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁷Dibuat sebagai ketentuan dan payung hukum untuk menjadi dasar melakukan aktivitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.¹⁸ Lembaga kemasyarakatan desa meliputi:

1. Rukun tetangga;
2. Rukun warga;
3. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
4. Karang taruna;
5. Pos pelayanan terpadu;
6. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

d. Lembaga Adat Desa

lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.¹⁹ Lembaga adat desa bisa dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

e. Fiqih Siyasah

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.

¹⁸ Pasal 11 Permendagri No 18 Tahun 2018 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

¹⁹Ibid

Fiqih siyasah adalah pemahaman islam yang mengacu pada ketatanegaraan. Penjabaran tentang fiqih siyasah banyak beberapa versi, namun secara garis besar fiqih siyasah memiliki pengertian ilmu yang mempelajari *hal ihwal* urusan umat dan negara dengan bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Penegasan Oprasional

Berbeda dengan penegasan konseptual diatas, secara oprasional penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terkait “Implementasi” adalah cara peneliti untuk mengetahui penerapan subjek hukum terkait peran dan fungsi kepemimpinan rukun tetangga. Sehingga setelah dilakukannya penelitian tersebut, harapannya bisa memberi sumbangsih pengetahuan tentang penerapan peran dan fungsi kepemimpinan rukun tetangga.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini menguraikan beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Pada bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan yang terdapat pada hasil wawancara ketua rukun tetangga Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi peraturan menteri dalam negeri no 18 tahun 2018 pada tempat penelitian dan saran penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang telah selesai dilakukan.